



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DJOKO SASONO
2. Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL
3. NHK : 96827

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 8.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m²/45 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 14500 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Bangunan Seluas 29 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 670 m²/350 m² di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 389 m²/200 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 272 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 170.250.000

1. MOBIL, VW BEETLE SEDAN Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
2. MOBIL, NISSAN JUKE SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. LAINNYA, --- (SEPEDA) SEPEDA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 250.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 5.733.110.860**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 5.221.754.349



F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.896.930.700
Sub Total	Rp.	21.672.045.909
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	21.672.045.909

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.